

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partisipasi politik warga negara merupakan unsur fundamental yang menentukan legitimasi dan keberlanjutan suatu pemerintahan. Di Indonesia, sebagai negara yang menganut sistem demokrasi elektoral, partisipasi dalam pemilihan umum menjadi indikator utama dari keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Partisipasi politik berkaitan dengan hubungan antara kesadaran politik dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi politik memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep demokrasi dan legitimasi. Ketiga elemen ini saling berhubungan dalam kerangka yang kuat. Dalam konteks demokrasi, partisipasi politik memengaruhi tingkat legitimasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan (Arniti, 2020).

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Jakarta, misalnya, sering kali tidak hanya dimaknai sebagai kontestasi politik lokal, tetapi juga sebagai miniatur dari pemilu nasional. Kandidat yang tampil di Pilkada Jakarta biasanya mendapatkan sorotan nasional, dan keberhasilan di Jakarta kerap dijadikan indikator elektabilitas untuk pemilu presiden atau pemilu legislatif. Dengan kata lain, Jakarta bukan hanya panggung lokal, tetapi juga laboratorium politik yang menunjukkan arah pergeseran strategi kekuasaan, perilaku pemilih, dan kualitas demokrasi di Indonesia secara keseluruhan. Jakarta tidak hanya menjadi simbol kekuasaan administratif, tetapi juga memainkan peran penting sebagai parameter politik nasional. Setiap dinamika politik yang terjadi di Jakarta memiliki referensi luas terhadap politik di daerah lain. Jakarta merupakan titik temu antara elite kekuasaan, institusi negara, masyarakat sipil, dan media nasional, menjadikannya barometer demokrasi sekaligus tempat uji coba berbagai strategi politik elektoral. Pemilihan kepala daerah, khususnya di kota besar seperti Jakarta, bukan hanya menjadi ajang kontestasi kekuasaan, tetapi juga mencerminkan seberapa inklusif dan representatif sistem demokrasi itu sendiri (Mietzner, 2014).

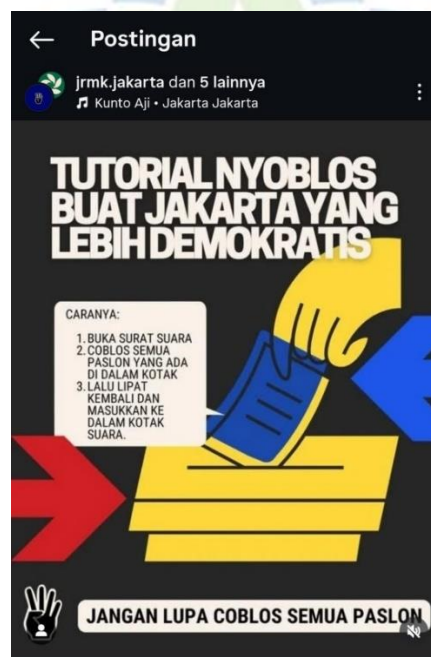
Namun, di balik gemuruh kontestasi Pilkada Jakarta yang ramai, terdapat pula fenomena partisipasi politik yang menunjukkan wajah lain dari demokrasi. Salah satunya adalah kecenderungan meningkatnya golongan putih (golput) pada Pilkada Jakarta tahun 2024. Kesenjangan inilah yang secara eksplisit disoroti dan ditindaklanjuti oleh Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) menjelang Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. JRMK merupakan sebuah organisasi masyarakat sipil yang menghimpun warga dari 32 kampung di wilayah Jakarta, termasuk Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan paling banyak dari Jakarta Utara (Nefi, 2024). Anggotanya mayoritas terdiri dari pedagang kaki lima serta masyarakat urban miskin yang mengalami persoalan serupa, terutama kekecewaan terhadap memburuknya praktik demokrasi di tingkat lokal (Validnews, 2024)

JRMK secara strategis menyerukan dan melakukan tindakan "coblos semua" pada surat suara. Meskipun secara teknis menghasilkan suara yang tidak sah, tindakan ini jauh dari sekadar kesalahan administratif. Bagi JRMK, langkah ini merupakan bentuk protes politik yang disengaja dan sarat makna, sebuah cara untuk menolak semua opsi kandidat yang dianggap tidak berpihak pada aspirasi mereka, sekaligus menyuarakan ketidakpercayaan terhadap proses representasi yang ada. Pilihan taktis JRMK ini dapat dipahami sebagai manifestasi dari demokrasi partisipatif, di mana warga negara tidak hanya pasif menerima pilihan yang ada, melainkan secara aktif menciptakan bentuk partisipasi mereka sendiri untuk memengaruhi arena politik dan menuntut akuntabilitas dari penguasa, sekalipun melalui jalur yang non-konvensional.

Protes yang dilakukan oleh JRMK ini dimanifestasikan melalui berbagai cara, termasuk pernyataan terbuka dan aksi simbolik. Dalam kesempatan tersebut, JRMK secara lantang menyatakan bahwa ketiga pasangan calon gubernur-wakil gubernur yang tampil dalam kontestasi tidak satupun mencerminkan aspirasi dan kebutuhan nyata warga miskin kota. Mereka menilai bahwa proses seleksi dan pencalonan kandidat sepenuhnya dikendalikan oleh kepentingan elite politik yang mengabaikan suara masyarakat akar rumput (Yaputra, 2024). Kekecewaan ini diperkuat oleh suara kritis dari

Sherly, perwakilan warga Kampung Bayam, yang dalam sebuah orasi menyatakan bahwa warga kampungnya secara kolektif memilih untuk tidak mendukung satu pun pasangan calon dalam Pilkada Jakarta. Keputusan ini, menurutnya, dilandasi oleh rasa skeptis yang mendalam terhadap pemerintah, yang dianggap belum mampu menyelesaikan persoalan mereka. Fenomena ini menyoroti adanya kesenjangan yang mendalam antara janji-janji demokrasi representatif dan realitas pengalaman partisipasi kelompok marginal, mendorong mereka untuk mencari strategi baru dalam menegaskan eksistensi dan tuntutan politiknya (Nefi, 2024).

Gambar 1. 1 Gerakan Coblos Semua JRMK



(Sumber: Instagram @jrmk.jakarta)

Protes lain diejawantahkan dalam bentuk seruan aksi simbolik berupa "tutorial nyoblos untuk Jakarta yang lebih demokratis" yang diunggah oleh akun Instagram JRMK Jakarta. Gerakan ini, yang juga disebut "gercos" (gerakan coblos semua), mengajak warga untuk mencoblos semua pasangan calon di surat suara sebagai bentuk protes politik, yang secara teknis akan membuat surat suara menjadi tidak sah. Tindakan ini bukan sekadar ketidaktahuan prosedur, melainkan bentuk ekspresi politik yang disengaja.

Fenomena ini menunjukkan bahwa gerakan *Gercos* tidak dapat dipandang secara terpisah dari konteks penyelenggaraan Pilkada Jakarta 2024 secara keseluruhan. Untuk memahami dampak serta signifikansi aksi protes politik ini, penting terlebih dahulu melihat gambaran umum mengenai jumlah pemilih dan partisipasi masyarakat yang tercatat dalam data resmi KPU. Melalui data tersebut, dapat ditelusuri sejauh mana tingkat partisipasi pemilih, besarnya angka golput, dan potensi hubungan antara suara tidak sah dengan gerakan protes politik yang muncul.

Gambar 1. 2 Data Pemilih Daerah Khusus Jakarta

Provinsi

: DAERAH KHUSUS JAKARTA

MODEL
D. HASIL PROV-KWK-Gubernur
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.		URAIAN			RINCIAN						
I		DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH			KEPULAUAN SERIBU	KOTA JAKARTA PUSAT	KOTA JAKARTA UTARA	KOTA JAKARTA BARAT	KOTA JAKARTA SELATAN	KOTA JAKARTA TIMUR	JUMLAH AKHIR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A		DATA PEMILIH									
		Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	10.497	403.345	666.181	946.565	855.957	1.166.266	4.048.811	
			PR	10.411	410.376	679.634	963.209	893.004	1.208.562	4.165.196	
			JML	20.908	813.721	1.345.815	1.909.774	1.748.961	2.374.828	8.214.007	
B		PENGGUNA HAK PILIH									
		1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	7.127	212.586	324.554	498.445	480.435	651.628	2.174.775	
			PR	7.872	240.735	384.912	566.199	561.572	769.784	2.531.074	
			JML	14.999	453.321	709.466	1.064.644	1.042.007	1.421.412	4.705.849	
		2. Jumlah Pemilih pendahlan yang menggunakan hak pilihnya	LK	86	877	823	996	1.139	1.032	4.943	
			PR	42	325	801	977	1.031	715	3.892	
			JML	128	1.202	1.624	1.963	2.173	1.745	8.835	
		3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	17	527	661	1.146	1.169	1.401	4.921	
			PR	17	499	615	1.249	1.131	1.276	4.788	
			JML	34	1.026	1.277	2.395	2.300	2.677	9.709	
		4. Jumlah Pragnaga Hak Pilh (B.1+B.2+B.3)	LK	7.230	213.990	326.038	500.577	482.743	654.051	2.184.639	
			PR	7.931	241.559	386.329	568.425	563.737	771.773	2.539.754	
			JML	15.161	455.549	712.367	1.069.002	1.046.480	1.425.824	4.724.393	

NO.		URAIAN			RINCIAN						
II		DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA			KEPULAUAN SERIBU	KOTA JAKARTA PUSAT	KOTA JAKARTA UTARA	KOTA JAKARTA BARAT	KOTA JAKARTA SELATAN	KOTA JAKARTA TIMUR	JUMLAH AKHIR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		1. Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		31.474	834.915	1.383.032	1.966.427	1.800.107	2.439.628	8.439.583	
		2. Jumlah surat suara yang digunakan		15.161	455.549	712.367	1.069.002	1.046.480	1.425.824	4.724.393	
		3. Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau kecuri coblos)		11	372	823	1.637	731	1.131	4.705	
		4. Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		6.302	378.994	669.842	889.788	752.896	1.012.653	3.710.485	

NO.		URAIAN			RINCIAN						
III		DATA PEMILIH DISABILITAS			KEPULAUAN SERIBU	KOTA JAKARTA PUSAT	KOTA JAKARTA UTARA	KOTA JAKARTA BARAT	KOTA JAKARTA SELATAN	KOTA JAKARTA TIMUR	JUMLAH AKHIR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	92	750	1.089	1.260	1.388	2.138	6.717	
			PR	92	953	1.131	1.391	1.541	2.110	7.218	
			JML	184	1.703	2.220	2.651	2.929	4.248	13.935	

(Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Khusus Jakarta)

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2024 merupakan salah satu momentum politik penting di Indonesia, mengingat Jakarta sebagai ibu kota negara memiliki posisi strategis baik dalam bidang pemerintahan maupun perekonomian nasional. Berdasarkan data resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta, jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mencapai 8.214.007 pemilih. Angka ini terdiri dari 4.165.196 pemilih laki-laki dan 4.048.811 pemilih perempuan yang

tersebar di enam wilayah administratif, yakni Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Dari total DPT tersebut, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara tercatat sebanyak 4.724.393 pemilih, atau sekitar 57,52% dari keseluruhan pemilih yang terdaftar. Dengan demikian, terdapat 3.489.614 pemilih atau 42,48% yang tidak menggunakan hak pilihnya (golput). Angka ini menunjukkan masih cukup tingginya tingkat golput di Jakarta, yang perlu menjadi perhatian dalam konteks partisipasi politik masyarakat.

Angka ketidakhadiran pemilih yang masif (42,48%) menjadi sinyal awal adanya ketidakpuasan mendalam terhadap sistem dan pilihan kandidat yang tersedia. Hal menunjukkan adanya indikasi kuat dari ekspresi ketidakpuasan politik melalui penolakan terhadap opsi yang tersedia dalam pemilu

Gambar 1. 3 Data Suara Tidak Sah

Provinsi

: DAERAH KHUSUS JAKARTA

MODEL
D. HASIL PROV-KWK-Gubernur
Halaman 2-2 Lembar 1

URAIAN		RINCIAN						
NO.	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	KEPULAUAN SERIBU	KOTA JAKARTA PUSAT	KOTA JAKARTA UTARA	KOTA JAKARTA BARAT	KOTA JAKARTA SELATAN	KOTA JAKARTA TIMUR	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON								
1	H. M. RIDWAN KAMIL - H. SUSWONO	6.578	152.235	261.463	396.880	375.391	535.613	1.718.160
2	Konjen Pol. (Purn), DHARMA PONGREKUN, S.I.K., M.M., M.Hum. - Dr. Ir. R. KUN WARDANA ABYOTO, M.T.	653	44.865	77.026	109.457	90.294	136.935	499.230
3	Dr. Ir. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M. - H. RANO KARNO, S.IP. (SI DOEL)	7.456	220.372	328.486	500.738	491.017	635.170	2.183.239

URAIAN		RINCIAN						
NO.	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH	KEPULAUAN SERIBU	KOTA JAKARTA PUSAT	KOTA JAKARTA UTARA	KOTA JAKARTA BARAT	KOTA JAKARTA SELATAN	KOTA JAKARTA TIMUR	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	14.687	417.472	666.975	997.075	956.702	1.307.718	4.360.629
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	474	38.077	45.392	71.927	89.778	118.116	363.764
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (A + V.B)	15.161	455.549	712.367	1.069.002	1.046.480	1.425.834	4.724.393

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN PROPINSI								
1	2	3	4	5	6	7		
WAHYU DINATA	ASRI MEYATARI	DODY WIJAYA	AMIT ZARULLAH	IRWAN SUPRUDI RAMBE	MUHAMMAD TARMIZI	NELVIA GUSTINA		

NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI								
1. H. M. RIDWAN KAMIL - H. SUSWONO	2. Konjen Pol. (Purn), DHARMA PONGREKUN, S.I.K., M.M., M.Hum. - Dr. Ir. R. KUN WARDANA ABYOTO, M.T.	3. Dr. Ir. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M. - H. RANO KARNO, S.IP. (SI DOEL)						

IDA MAHMUDAH.

(Sumber: Komisi Pemilihan Umum Daerah Khusus Jakarta)

Selain itu, persoalan lain yang muncul adalah tingginya angka suara tidak sah. Berdasarkan data rekapitulasi KPU, dari total 4.724.393 surat suara yang digunakan, terdapat 4.360.629 suara sah dan 363.764 suara tidak sah, atau sekitar 7,7% dari total surat suara. Suara tidak sah ini muncul karena berbagai

faktor, seperti surat suara yang dicoblos lebih dari satu pasangan calon, surat suara yang tidak dicoblos sama sekali, maupun kerusakan fisik pada surat suara.

Fenomena tingginya suara tidak sah ini tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan politik yang melingkupi kehidupan warga, khususnya kelompok masyarakat miskin kota. Bagi sebagian dari mereka, proses pemilihan tidak hanya soal memilih calon pemimpin, tetapi juga berkaitan dengan pengalaman panjang ketidakpercayaan terhadap negara dan institusi politik yang dianggap tidak menghadirkan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menciptakan jarak antara warga dan ruang-ruang partisipasi formal, sehingga pilihan untuk tidak menggunakan hak pilih, atau secara tidak sengaja menghasilkan suara tidak sah, dapat dipahami sebagai ekspresi dari keterasingan politik.

Di sinilah letak problematisasi yang menjadi dasar penelitian ini. Secara normatif, Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada sebagai sarana representasi rakyat. Namun praktiknya, masih banyak kelompok masyarakat terutama warga miskin kota yang merasa tidak memiliki tempat dalam sistem tersebut. Mereka menghadapi faktor-faktor struktural seperti kebijakan kota yang kurang berpihak, dan minimnya saluran partisipasi formal yang efektif. Dalam menghadapi batasan-batasan struktural ini, JRMK sebagai sebuah organisasi, dengan agensi kolektifnya, yaitu memutuskan untuk melakukan tindakan "coblos semua", tindakan itu menjadi bentuk ekspresi sebagai penolakan strategis terhadap sistem yang mereka anggap telah gagal mewakili kepentingan mereka. Hal ini menjadi landasan, untuk mengetahui bagaimana habitus kolektif dan mobilisasi modal Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) digunakan dalam arena politik untuk membentuk gerakan "coblos semua" sebagai praktik sosial.

Kondisi ini juga membuka ruang untuk melakukan penelitian dalam melihat bentuk dan makna aspirasi dan gerakan "coblos semua" yang dilakukan oleh JRMK sebagai respons terhadap Pilkada Jakarta 2024. Penelitian ini tidak hanya ingin menggambarkan fenomena *protest vote* sebagai statistik, tetapi ingin menggali narasi, motivasi, dan pemaknaan politik dari para pelakunya dalam

hal ini Jaringan Rakyat Miskin Kota atau JRMK. Dengan kata lain, fokus penelitian ini adalah pada pengalaman politik dari Jaringan Rakyat Miskin Kota dalam menginisiasi bentuk dari sebuah partisipasi politik dalam konteks Pilkada Jakarta tahun 2024.



B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana habitus kolektif dan mobilisasi modal Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) digunakan dalam arena politik untuk membentuk gerakan "coblos semua" sebagai praktik sosial?
2. Bagaimana bentuk dan makna aspirasi yang dilakukan oleh Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dalam Pilkada Jakarta 2024 melalui gerakan "coblos semua"?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis habitus kolektif dan mobilisasi modal Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) pada arena politik dalam membentuk gerakan "coblos semua" sebagai praktik sosial
2. Untuk memahami bentuk serta makna aspirasi yang dilakukan oleh Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dalam Pilkada Jakarta 2024 melalui gerakan "coblos semua".

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Ilmiah

Secara ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah literatur tentang partisipasi politik non-konvensional, khususnya "*protest vote*" yang dilakukan oleh kelompok marginal dalam konteks demokrasi elektoral di Indonesia. Temuan penelitian ini akan memberikan perspektif empiris yang lebih mendalam mengenai bagaimana teori demokrasi partisipatif dapat diterapkan untuk memahami bentuk-bentuk partisipasi di luar jalur formal dan bagaimana kelompok terpinggirkan berupaya menyuarakan aspirasi mereka ketika merasa tidak terwakili. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi landasan bagi studi-studi lanjutan mengenai gerakan sosial dan partisipasi politik dari perspektif akar rumput.

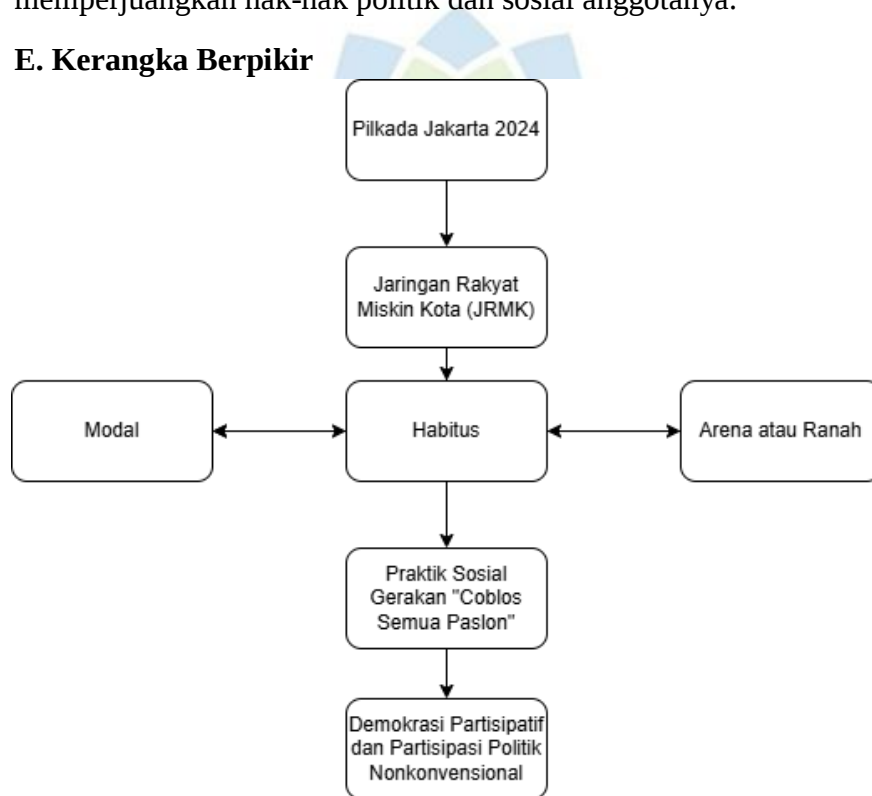
2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi berbagai pihak, terutama penyelenggara pemilu, partai politik, serta pembuat kebijakan di tingkat daerah maupun nasional. Temuan penelitian ini dapat membantu pihak-pihak tersebut untuk memahami mengapa sebagian warga,

khususnya kelompok masyarakat miskin kota, memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pemilu secara formal, dan bagaimana mereka mengartikulasikan aspirasi politik mereka melalui gerakan “coblos semua”

Pemahaman ini penting untuk memperbaiki mekanisme representasi dan meningkatkan kualitas demokrasi, terutama dalam hal penyusunan kebijakan yang lebih inklusif serta peningkatan partisipasi yang bermakna bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat bagi organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi seperti JRMK dalam merumuskan strategi gerakan yang lebih efektif dalam memperjuangkan hak-hak politik dan sosial anggotanya.

E. Kerangka Berpikir



Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam fenomena Gerakan Coblos Semua (Gercos) oleh Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta tahun 2024. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini akan menggunakan perspektif teoritis dari Teori Praktik Sosial, Teori Demokrasi, dan Teori Partisipatif Politik. Kerangka berpikir ini akan menjelaskan bagaimana

konsep-konsep kunci dari teori tersebut akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Teori Praktik Sosial digunakan untuk menganalisis habitus kolektif dan mobilisasi modal Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) pada arena politik dalam membentuk gerakan “coblos semua” sebagai praktik sosial, serta Teori Demokrasi Partisipatif menafsirkan makna aspirasi yang disampaikan melalui gerakan tersebut, serta Teori Partisipasi Politik untuk menjelaskan Gercos sebagai bentuk Partisipasi Politik.

Kerangka berpikir ini diawali dengan Pilkada Jakarta 2024 sebagai konteks umum dan arena politik yang melatari seluruh dinamika yang diteliti. Pilkada Jakarta, sebagai kontestasi politik lokal berskala nasional, menjadi panggung di mana berbagai aktor dan kepentingan berinteraksi. Dalam ranah inilah, Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) muncul sebagai aktor kunci, sebuah organisasi masyarakat sipil yang mewakili kepentingan warga miskin urban, yang pada Pilkada kali ini memilih untuk menyuarakan aspirasinya melalui gerakan “coblos semua”.

Untuk memahami mengapa JRMK memilih bentuk protes tersebut dan bagaimana faktor-faktor pendorongnya bekerja, penelitian ini menggunakan Teori Praktik Sosial Pierre Bourdieu. Habitus akan dipahami sebagai sistem disposisi yang diinternalisasi oleh anggota JRMK, yang terbentuk dari pengalaman hidup kolektif mereka sebagai kelompok yang termarginalkan. Fokusnya adalah pada disposisi yang mendorong mereka memilih bentuk partisipasi nonkonvensional seperti Gerakan 'coblos semua'. Arena dipandang sebagai ruang sosial kompetitif di mana berbagai aktor berinteraksi dan bersaing untuk sumber daya politik. Arena ini kemungkinan besar dirasa tidak berpihak atau tidak responsif terhadap aspirasi mereka, sehingga memicu pencarian bentuk ekspresi politik lain. Modal mengacu pada beragam sumber daya yang mereka miliki dan manfaatkan dalam arena ini untuk kemudian diakumulasi dan membentuk praktik sosial.

Interaksi antara Habitus JRMK, ranah politik Pilkada Jakarta yang tidak inklusif, dan mobilisasi modal yang mereka miliki secara kolektif, menjadi faktor pendorong yang menghasilkan Praktik Sosial Gerakan "Coblos Semua Paslon". Tindakan ini adalah manifestasi konkret dari agensi JRMK dalam merespons kondisi struktural yang mereka hadapi. Hal ini perlu diuraikan faktual untuk melihat habitus kolektif dan mobilisasi modal Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) pada arena politik dalam membentuk gerakan "coblos semua" sebagai praktik sosial

Dalam menganalisis bentuk dan makna aspirasi dari gerakan "coblos semua paslon", penelitian ini akan menggunakan lensa Teori Demokrasi Partisipatif dan Teori Partisipasi Politik. Teori ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan praktik Partisipasi Politik Nonkonvensional JRMK sebagai bentuk keterlibatan aktif yang sah. Melalui teori ini, akan digali bagaimana gerakan "coblos semua" ini berfungsi sebagai bentuk ekspresi, penolakan terhadap representasi yang tidak memadai, serta upaya JRMK untuk menegaskan kembali agensi politik dan menuntut akuntabilitas dalam kerangka demokrasi yang lebih inklusif.

